

The Strategy for Optimizing Grain Absorption in Rias Village, Toboali District, South Bangka Regency

Strategi Optimalisasi Penyerapan Gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Alkholik * , Dinda Aulia , Dedy Firiansyah , Rahmat Bahrudin , Syahadan , Yudi Septa
Pranoto , and Fournita Agustina 

Master's Program in Agricultural Scienc, University of Bangka Belitung, Bangka
Regency, Bangka Belitung Islands Province, 33172, Indonesia

* Correspondence: alkholik1812@gmail.com

ARTICLE INFO

How to cite:

Alkholik, A., Aulia, D.,
Firiansyah, D., Bahrudin, R.,
Syahdan, S., Pranoto, Y., S., &
Agustina, F. (2026). *The Strategy
for Optimizing Grain Absorption
in Rias Village, Toboali District,
South Bangka Regency*. *Journal of
Integrated Agribusiness*, 8(1), 33-
44.

DOI: [10.33019/jia.v8i1.7257](https://doi.org/10.33019/jia.v8i1.7257)

Copyright © 2026. Owned by
the authors, published by the
*Journal of Integrated
Agribusiness*.



OPEN ACCESS

This work is licensed under a
*Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License*.

Published: June 30, 2026

ABSTRACT

The problem of grain absorption in Rias Village, Toboali Subdistrict, is primarily driven by structural imbalances in the local grain market, resulting from the absence of Bulog as a purchasing institution during the harvest period. This condition has created an uncompetitive market structure in which middlemen dominate transactions and weaken farmers' bargaining power. This study aims to determine priority strategies for optimizing grain absorption using a multicriteria decision-making approach. The research employed a survey method involving 12 expert respondents, including agricultural extension officers, Bulog partners, and leaders of farmer institutions, and was analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP). All pairwise comparison matrices satisfied the consistency requirement, with a Consistency Ratio (CR) ≤ 0.1 . The results indicate that upstream market structure intervention is the top priority strategy (weight 0.4635), followed by the development and modernization of post-harvest infrastructure (weight 0.3368) and reform of Bulog's financial regulations (weight 0.1997). These findings emphasize that the effectiveness of government price policy is not determined solely by price setting but depends heavily on market mechanisms and institutional strengthening at the local level. Policy implications highlight the necessity of structural, institution-based interventions to enable Bulog to function effectively as a price stabilizer at the village level.

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP); Bulog; Grain; Absorption; Strategy

ABSTRAK

Permasalahan penyerapan gabah di Desa Rias, Kecamatan Toboali, dipengaruhi oleh ketimpangan struktur pasar lokal akibat tidak berfungsinya Bulog sebagai lembaga penyerapan pada saat panen raya. Kondisi ini membentuk pasar yang tidak kompetitif, dimana tengkulak mendominasi transaksi dan melemahkan posisi tawar petani. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas strategi optimalisasi penyerapan gabah berbasis pengambilan keputusan multikriteria. Penelitian menggunakan metode survei dengan 12 responden ahli yang terdiri dari penyuluh pertanian, mitra Bulog, dan pimpinan kelembagaan petani, serta dianalisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Seluruh matriks perbandingan berpasangan memenuhi kriteria konsistensi dengan nilai Consistency Ratio (CR) $\leq 0,1$. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi struktur pasar di tingkat hulu menjadi strategi prioritas utama (bobot 0,4635), diikuti oleh pembangunan dan modernisasi infrastruktur pascapanen (bobot 0,3368) dan reformasi regulasi keuangan Bulog (bobot 0,1997). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan harga pemerintah tidak hanya ditentukan oleh penetapan HPP, tetapi sangat bergantung pada perbaikan mekanisme pasar dan penguatan kelembagaan petani. Implikasi kebijakan penelitian ini menekankan pentingnya intervensi struktural berbasis kelembagaan lokal agar Bulog dapat berfungsi efektif sebagai stabilisator harga di tingkat desa.

Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP); Bulog; gabah; penyerapan; strategi

1. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Kabupaten Bangka Selatan salah satu wilayah yang berkontribusi terhadap produksi tanaman pangan. Salah satu tanaman pangan yang dihasilkan di wilayah ini adalah padi sawah. Oktia et al., (2020) mengatakan terdapat 11 desa di Kecamatan Toboali yang telah melakukan usahatani padi sawah yaitu Desa Rias, Desa Teladan, Desa Tanjung Ketapang, Kota Toboali, Desa Kepoh, Desa Rindik, Desa Kaposang, Desa Gadung, Desa Bikang, Desa Jeriji, dan Desa Serdang.

Desa Rias dulunya merupakan kawasan permukiman transmigrasi pertama di Bangka Selatan. Desa Rias terletak sekitar 25 km dari ibukota Bangka Selatan yaitu Toboali dan 90 persen penduduk Desa Rias

bekerja sebagai petani padi sawah (Nopriansyah et al., 2021). Desa Rias Kecamatan Toboali dikenal luas melalui aktivitas padi yang cukup produktif dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu lumbung padi daerah (Evahelda et al., 2025).

Perum Bulog salah satu penyedia pasokan bahan pangan beras yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Ikorasaki et al., 2024). Perum Bulog mengambil atau membeli gabah langsung dari petani Desa Rias melalui Mitra Bulog. Keberadaan Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyerap gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. Nopriansyah et al., (2021) mengatakan esensi dari penerapan HPP tersebut untuk memberikan perlindungan pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat produsen terutama pada saat panen raya. Penerapan HPP gabah yang dilakukan berdasarkan kadar air dan kadar hampa. Maulana & Rachman (2011), penerapan kadar air dan kadar hampa dipertahankan dengan pertimbangan bahwa sebagian petani memproduksi gabah pada kualitas tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas petani padi. Berdasarkan data dan temuan lapangan di Desa Rias, beberapa waktu lalu terjadi permasalahan serius berupa tidak adanya penyerapan gabah oleh Bulog pada saat musim panen. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung bagi petani padi sawah, mengingat Bulog selama ini dipersepsikan sebagai penyerap utama gabah dengan harga yang relatif lebih menjamin dibandingkan pasar bebas atau pedagang pengumpul. Ketika penyerapan oleh Bulog tidak berjalan, petani berada pada posisi tawar yang lemah dan menghadapi ketidakpastian dalam pemasaran hasil panen mereka. Tidak optimalnya penyerapan gabah tersebut menunjukkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan kelembagaan dalam sistem pemasaran gabah di Desa Rias. Permasalahan ini tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja, melainkan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kesiapan kelembagaan penyerapan, mekanisme distribusi, koordinasi antar pelaku, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika pemasaran gabah di Desa Rias. Oktia et al. (2020) mengidentifikasi pola penjualan gabah petani yang didominasi oleh tengkulak, sedangkan Nopriansyah et al. (2021) menelaah dampak kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap permintaan dan penawaran gabah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemasaran gabah di Desa Rias masih menghadapi permasalahan struktural yang berulang. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan kerangka penentuan strategi penyerapan gabah secara komprehensif.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji pola pemasaran dan dampak kebijakan HPP di Desa Rias, belum terdapat penelitian yang secara sistematis menentukan prioritas strategi penyerapan gabah berbasis pengambilan keputusan multikriteria. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan permasalahan, tetapi juga mampu menyusun urutan prioritas kebijakan secara rasional dan terukur.

Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka pengambilan keputusan strategis berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP) yang diintegrasikan dengan perspektif New Institutional Economics (NIE). Dalam kerangka ini, permasalahan penyerapan gabah dipahami sebagai bentuk kegagalan kelembagaan (*institutional failure*), dimana kebijakan harga pemerintah kehilangan efektivitasnya akibat struktur pasar monopsonistik dan tingginya biaya transaksi yang dihadapi petani. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur pemasaran hasil pertanian, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan penyerapan gabah yang lebih kontekstual di tingkat desa.

2. Metodologi

Penelitian dilaksanakan pada sentra produksi padi di Desa Rias. Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling

pada wilayah yang menjadi sentra tanaman padi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan teknik wawancara langsung dan menggunakan instrumen berupa kuesioner terstruktur. Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian Desa Rias, Mitra Bulog, Ketua Gapoktan, Ketua Upja dan Ketua KTNA. Responden penelitian dipilih menggunakan pendekatan expert judgment, yaitu aktor yang memiliki kewenangan dan pengetahuan langsung dalam sistem penyerapan gabah di Desa Rias, meliputi penyuluh pertanian, mitra Bulog, serta pimpinan kelembagaan petani. Jumlah 12 responden dinilai memadai dalam metode AHP karena kualitas keahlian responden lebih diutamakan dibandingkan ukuran sampel statistik. Seluruh matriks perbandingan berpasangan diuji konsistensinya dan menunjukkan nilai Consistency Ratio (CR) $\leq 0,1$, sehingga hasil pembobotan dinyatakan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung menggunakan kuesioner sebagai alat bantu. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi seperti Pertanian Kabupaten Bangka Selatan dan studi literatur.

Metode analisis menggunakan Analytical Hierarchy Process. Menurut Ikorasaki et al., (2024), Analytical Hierarchy Process adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat dalam pengambilan keputusan dengan cara memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan dengan membuat perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pengambilan keputusan dimulai dengan membuat keseluruhan hirarki keputusan. Hirarki tersebut menunjukkan faktor-faktor yang ditimbang serta berbagai alternatif yang ada. Kemudian sejumlah perbandingan berpasangan dilakukan untuk mendapatkan penetapan nilai eigen dan hasilnya. Sebelum penetapan, terlebih dahulu ditentukan kelayakan hasil nilai faktor yang didapat dengan mengukur tingkat konsistensinya. Pada akhirnya alternatif dengan jumlah nilai tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Lestari et al., (2024) mengatakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dipilih sebagai algoritma utama dalam sistem ini untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria.

Menurut Wulandari (2019) dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya:

1. Membuat hirarki

Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan pemecahan menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun hirarki, dan menggabungkannya atau mensintesisnya.

2. Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan bisa diukur menggunakan tabal analisis.

3. Menentukan prioritas (Synthesis of Priority)

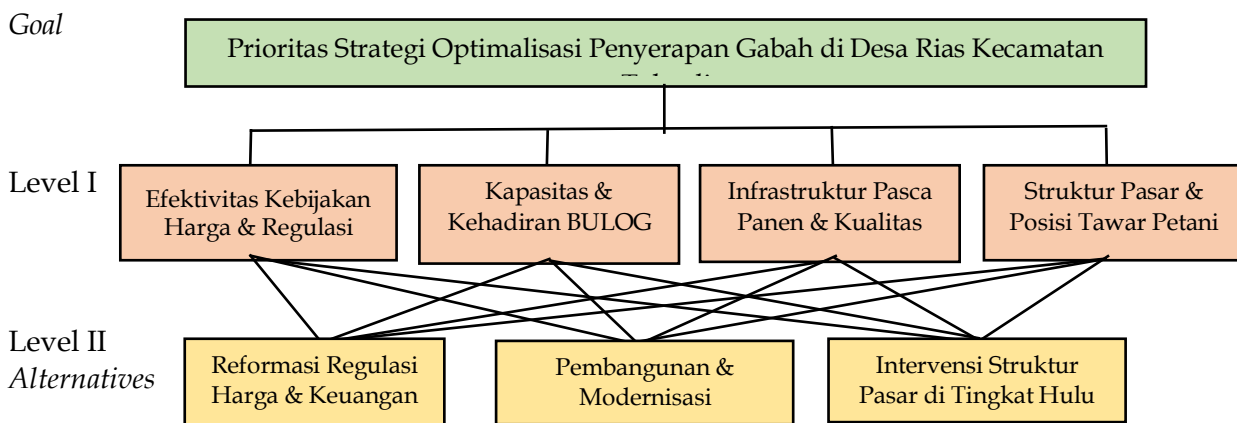
Pada setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relative dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika.

4. Konsistensi logis (Logical Consistency)

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

Desain penelitian yang digunakan sebagai penelitian deskriptif memiliki masalah yang jelas untuk membantu pembuatan keputusan dan memilih alternatif terbaik dalam menentukan strategi optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali.



Gambar 1: Struktur Hirarki AHP
Sumber: Olah Data Primer (2025)

Gambar 1 menunjukkan susunan hirarki AHP dalam menentukan penyerapan gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali. Berikut dijelaskan tujuan, kriteria dan alternatif yang digunakan:

1. *Goal* merupakan tujuan dari keputusan yang didukung oleh kriteria dan alternatif untuk menentukan strategi penyerapan gabah di Desa Rias.
2. Kriteria merupakan factor-faktor pendukung yang digunakan untuk penilaian penyerapan gabah di Desa Rias.
3. *Alternatives* merupakan pilihan-pilihan konkret yang tersedia untuk dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

3.1 Kriteria Utama

Penentuan prioritas strategi optimalisasi penyerapan gabah diawali dengan pembobotan empat kriteria utama menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil pembobotan kriteria utama disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Pembobotan Kriteria Utama

Kriteria Utama	Bobot	Prioritas
Struktur Pasar & Posisi Tawar Petani	0,4728	1
Infrastruktur Pasca Panen & Kualitas	0,3077	2
Kapasitas & Kehadiran BULOG	0,1528	3
Efektivitas Kebijakan Harga & Regulasi	0,0667	4

Sumber: Olah Data Primer (2025)

Hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan bahwa kriteria struktur pasar & posisi tawar petani memiliki bobot tertinggi yaitu 0,4728, diikuti oleh infrastruktur pasca panen & kualitas gabah dengan bobot 0,3077, kapasitas & kehadiran Bulog sebesar 0,1529, serta efektivitas kebijakan harga & regulasi sebagai prioritas terakhir dengan bobot 0,0667. Urutan prioritas ini mencerminkan kondisi nyata penyerapan gabah di Desa Rias yang lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar dan relasi kekuasaan antar pelaku dibandingkan aspek kebijakan formal.

Struktur Pasar & Posisi Tawar Petani

Kriteris struktur pasar & posisi tawar petani menjadi prioritas utama dalam optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias. Tingginya bobot kriteria ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata pada harga yang ditetapkan pemerintah, melainkan pada ketimpangan relasi pasar antara petani dan pembeli gabah. Ketika Bulog tidak melakukan penyerapan pada saat panen, pasar gabah di Desa Rias cenderung bersifat monopsonistik, dimana tengkulak menjadi aktor dominan sekaligus pembeli tunggal.

Kriteria ini menyentuh aspek struktural pasar yang mendominasi rantai nilai gabah, yaitu dominasi perantara. Ketika Bulog tidak menyerap gabah di desa, tengkulak menjadi satu-satunya pilihan bagi petani yang membutuhkan likuiditas cepat. Tengkulak atau pengepul menawarkan harga yang kadang lebih menarik atau proses yang jauh lebih cepat dan sederhana dibandingkan Bulog yang terikat HPP dan standar mutu. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Oktia *et al.*, (2020) dan Aflah *et al.*, (2023) yang menyatakan ketergantungan petani terhadap tengkulak semakin kuat akibat adanya fasilitas ijon, pembayaran tunai, dan kemudahan transaksi.

Posisi tawar petani menjadi sangat lemah yang memungkinkan harga anjlok di bawah biaya produksi. Dalam memperbaiki posisi tawar petani, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi petani di tingkat hulu, seperti koperasi, BUMDes atau lumbung pangan desa.

Lembaga-lembaga ini jika direvitalisasi dan memiliki modal yang kuat, dapat berfungsi sebagai penyerap gabah alternatif yang lebih adil dan menyaingi efisiensi informal tengkulak. Ketidakhadiran opsi pasar alternatif dan minimnya akses terhadap informasi harga *real-time* memperparah kerentanan petani. Intervensi kebijakan harus memprioritaskan bagaimana lembaga formal dapat menandingi efisiensi layanan tengkulak tanpa mengorbankan perlindungan harga. Optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias harus diarahkan pada perbaikan struktur pasar, baik melalui penguatan kelembagaan petani, diversifikasi saluran pemasaran, maupun penciptaan mekanisme pasar yang lebih kompetitif.

Infrastruktur Pascapanen dan Kualitas

Kriteria infrastruktur pasca panen dan kualitas gabah menempati prioritas kedua dengan bobot yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur pasar menjadi persoalan utama, aspek teknis pasca panen tetap memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyerapan gabah oleh Bulog. Penerapan HPP gabah oleh Bulog mensyaratkan standar tertentu, terkait kadar air dan kadar hampa (Maulana & Rachman, 2011).

Kriteria infrastruktur pascapanen dan standar kualitas adalah *bottleneck* teknis yang membatasi volume penyerapan, terlepas dari kebijakan harga atau ketersediaan dana. Kualitas beras sangat ditentukan oleh kadar air. Musim panen seringkali bertepatan dengan musim hujan sehingga menghasilkan Gabah Kering Panen (GKP) basah. Bulog diamanahkan untuk menjaga kualitas beras dan tidak menyalurkan beras di bawah standar Bulog. Standar yang ketat termasuk kadar air dan skor organoleptik digunakan untuk membatasi penyerapan saat gabah melimpah dan kualitas rendah. Standar kadar air gabah sebesar 25% sehingga apabila petani memiliki gabah dengan kadar air 26% maka akan terjadi pemotongan harga jual gabah. Ketika tekanan tekanan penyerapan tinggi dan risiko penurunan mutu tinggi, pengetatan standar ini memicu harga yang merugikan petani. Hal ini memperkuat ketergantungan petani kepada tengkulak yang cenderung lebih fleksibel terhadap kualitas gabah meskipun dengan harga yang lebih rendah.

Kapasitas dan Kehadiran Bulog

Kriteria kapasitas dan kehadiran Bulog menempati urutan ketiga dengan bobot 0,1528. Bobot ini mengidentifikasi bahwa meskipun Bulog memiliki peran strategis dalam sistem perberasan nasional, permasalahan di Desa Rias tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas Bulog, tetapi juga oleh kondisi struktural pasar yang telah terbentuk. Ketidakhadiran Bulog pada saat panen raya menciptakan ruang dominasi bagi tengkulak, sebagaimana tercemin dalam temuan lapangan penelitian ini.

Lkorasaki *et al.*, (2024) menegaskan bahwa Bulog berfungsi sebagai penyedia cadangan pangan dan stabilisator harga. Namun, ketika fungsi tersebut tidak berjalan optimal di tingkat lokal, dampaknya langsung dirasakan oleh petani. Rendahnya bobot kriteria ini dibandingkan dua kriteria sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas Bulog saja tidak cukup jika

tidak diiringi dengan perbaikan struktur pasar dan kesiapan petani dalam memenuhi standar kualitas gabah.

Kriteria ini mengevaluasi kapabilitas dan keefektifan Bulog sebagai operator tunggal pengadaan CPP. Peningkatan jangkauan Bulog bukan hanya masalah logistik tetapi merupakan intervensi struktural untuk meningkatkan *bargaining power* petani. Mekanisme pendanaan CPP harus terjamin dan cepat cair, seperti yang diatur oleh peraturan terkait Permenkeu dan BAPANAS. Ketika pendanaan untuk penugasan penyerapan tidak memadai atau proses pencairan lambat, kemampuan Bulog untuk penyerapan gabah saat panen terhambat. Konflik antara kewajiban Bulog menjalankan *Public Service Obligation* (PSO) dan risiko finansial komersial menjadi pertimbangan Bulog dalam penyerapan gabah.

Efektivitas Kebijakan Harga & Regulasi

Kriteria efektivitas kebijakan harga dan regulasi menjadi prioritas terakhir dengan bobot paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan HPP gabah sebesar Rp6.500/kg sudah di anggap cukup jelas dan di pahami oleh petani maupun pemangku kepentingan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nopriansyah *et al.*, (2021) esensi HPP adalah melindungi pendapat petani dan menjaga stabilitas harga. Akan tetapi, dalam kondisi desa rias, kebijakan harga tersebut tidak memiliki daya pengaruh ketika lembaga penyerapan tidak hadir dan struktur pasar didominasi oleh tengkulak. Hal ini menjelaskan mengapa kriteria kebijakan dan regulasi memperoleh bobot paling rendah, karena persoalan utama terletak pada akses dan mekanisme pasar bukan pada substansi kebijakan itu sendiri.

Kriteria kebijakan harga yang diwujudkan melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah untuk melindungi petani (sebagai floor price) dan menjamin pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CPP). Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) adalah sebesar Rp 6.500/kg berlaku sejak 15 Januari 2025 dengan syarat kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10% sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025. Sementara itu HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 7.300/kg dan di gudang Bulog sebesar Rp 7.400/kg berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024.

3.2 Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil analisis AHP, tiga alternatif strategi diusulkan sebagai solusi komprehensif untuk optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali. Hasil pembobotan alternatif utama disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Pembobotan Alternatif Utama

Alternatif Utama	Bobot	Prioritas
Intervensi Struktur Pasar di Tingkat Hulu	0,4635	1
Pembangunan & Modernisasi Infrastruktur	0,3368	2
Reformasi Regulasi Keuangan	0,1997	3

Sumber: Olah Data Primer (2025)

Alternatif 1: Intervensi Struktur Pasar di Tingkat Hulu

Alternatif intervensi struktur pasar di tingkat hulu menjadi prioritas utama dalam optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias. Tingginya bobot strategi ini selaras dengan hasil pembobotan kriteria sebelumnya, dimana struktur pasar dan posisi tawar petani menjadi faktor paling dominan (0,4728). Hal ini menegaskan bahwa akar permasalahan penyerapan gabah di Desa Rias terletak pada ketimpangan relasi pasar antara petani dan pembeli. Dalam kondisi tidak berfungsinya Bulog sebagai penyerap gabah pada saat pasar di Desa Rias berubah menjadi monopsoni lokal yang dikuasai oleh tengkulak. Tengkulak tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penyedia modal, transportasi, dan likuiditas tunai, sebagaimana diungkapkan Oktia *et al.*, (2020). Ketergantungan ini menyebabkan petani kehilangan kebebasan dalam menentukan harga dan waktu jual sehingga posisi tawar mereka menjadi sangat lemah.

Intervensi struktur pasar dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani (kelompok tani atau koperasi), penciptaan saluran pemasaran alternatif, serta peningkatan akses langsung petani ke penyerapan formal. Aflah *et al.*, (2023) menegaskan bahwa tanpa intervensi kelembagaan, pasar gabah di tingkat desa cenderung tidak kompetitif dan merugikan petani. Alternatif ini bertujuan untuk mendistribusikan daya tawar di pasar gabah dengan memberdayakan petani. Penguatan Lembaga Ekonomi Petani (LEP) dengan memberikan penugasan formal, pendanaan, dan pelatihan kepada koperasi, BUMDes atau Lembaga Ekonomi Petani (LEP) yang terverifikasi untuk menjadi *off-taker* gabah di tingkat desa. Strategi ini merupakan cara Bulog untuk hadir secara efektif di lapangan melalui perpanjangan tangan yang efisien. Selain itu, transparansi informasi harga perl dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi harga gabah/beras yang *real-time* dan mudah diakses petani sehingga petani memiliki acuan harga yang kuat saat bernegosiasi dengan perantara informal.

Alternatif 2: Pembangunan & Modernisasi Infrastruktur

Alternatif pembangunan dan modernisasi infrastruktur pasca panen menempati prioritas kedua dengan bobot yang realtif tinggi. Strategi ini berkolerasi kuat dengan kriteria infrastruktur pasca panen gabah yang memiliki bobot 0,3077. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan struktur pasar saja belum cukup apabila petani tidak mampu memenuhi standar kualitas gabah yang ditetapkan oleh Bulog.

Alternatif ini berfokus pada penghapusan hambatan logistik dan teknis.

1. Investasi *Dryer*: Melakukan investasi pada fasilitas pengeringan mekanis (*dryer*) untuk Bulog dan melalui skema kemitraan. Hal ini memungkinkan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) basah dalam jumlah besar saat musim hujan sehingga menghilangkan alasan penolakan berbasis kadar air.

2. Optimalisasi Gudang dan Kualitas: Revitalisasi gudang dengan menerapkan teknologi penyimpanan modern (misalnya sistem *racking*) untuk meningkatkan efisiensi volume dan mengimplementasikan sistem pengendalian mutu beras yang lebih ketat untuk meminimalkan penurunan mutu selama penyimpanan.

Penelitian Maulana & Rachman (2011) menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas pasca panen dapat meningkatkan daya saing gabah petani dan memperbesar peluang penyerapan oleh lembaga formal. Pembangunan dan modernisasi infrastruktur pasca panen berfungsi sebagai strategi pendukung utama yang memperkuat efektivitas intervensi pasar dan kehadiran Bulog.

Alternatif 3: Reformasi Regulasi Keuangan

Alternatif reformasi regulasi keuangan Bulog menjadi prioritas terakhir dengan bobot terendah. Hal ini konsisten dengan hasil pembobotan kriteria efektifitas kebijakan harga dan regulasi yang juga memperoleh bobot paling kecil (0,0667). Hal ini mengidentifikasi bahwa secara normatif kebijakan HPP gabah sudah cukup jelas dan diterima oleh petani, namun belum efektif karena lemahnya implementasi di tingkat lokal.

Nopriansyah *et al.*, (2021) menegaskan bahwa tujuan utama HPP adalah melindungi pendapat petani dan menjaga kestabilan harga. Namun, ketika Bulog tidak memiliki fleksibel anggaran, keterbatasan likuiditas atau kendala operasional, kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Ikorasaki *et al.*, (2024) juga menyatakan bahwa efektifitas Bulog sangat bergantung pada dukungan regulasi keuangan yang adaptif terhadap kondisi panen dan fluktuasi produksi.

Rendahnya bobot strategi ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi keuangan bulog bersifat komplementer bukan solusi utama. Tanpa perbaikan struktur pasar dan kesiapan teknis petani, perubahan regulasi keuangan tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan penyerapan gabah di Desa Rias. Alternatif ini memprioritaskan perbaikan instrumen kebijakan dan kapasitas finansial Bulog yaitu kepastian Dana CPP dengan menetapkan dan memastikan alokasi Dana Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berada dalam mekanisme yang cepat dan terpisah dari modal kerja komersial Bulog, memungkinkan Bulog segera bertindak sebagai *market maker* tanpa hambatan likuiditas.

Dominannya bobot kriteria struktur pasar dan posisi tawar petani menunjukkan bahwa permasalahan utama penyerapan gabah di Desa Rias tidak terletak pada kebijakan harga semata, melainkan pada ketimpangan struktur pasar lokal. Ketika Bulog tidak hadir pada saat panen, pasar gabah di Desa Rias cenderung bersifat monopsonistik, dimana tengkulak berperan sebagai pembeli dominan sekaligus penentu harga. Kondisi ini mencerminkan kegagalan kelembagaan (*institutional failure*) sebagaimana dijelaskan dalam perspektif New Institutional Economics, dimana institusi formal gagal mengatur mekanisme pasar sehingga aktor informal mengambil alih fungsi koordinasi ekonomi.

Tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak juga menunjukkan besarnya biaya transaksi yang dihadapi petani, seperti kebutuhan likuiditas cepat, keterbatasan akses informasi harga, dan minimnya alternatif saluran pemasaran. Dalam konteks ini, kebijakan

HPP kehilangan daya intervensinya karena tidak ditopang oleh struktur pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, hasil AHP yang memprioritaskan intervensi struktur pasar di tingkat hulu menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani dan penciptaan saluran pemasaran alternatif merupakan prasyarat bagi efektivitas kebijakan penyerapan gabah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar dan posisi tawar petani merupakan faktor paling menentukan dalam optimalisasi penyerapan gabah di Desa Rias, diikuti oleh infrastruktur pascapanen, kapasitas dan kehadiran Bulog, serta efektivitas kebijakan harga dan regulasi. Intervensi struktur pasar di tingkat hulu menjadi strategi prioritas utama (0,4635), diikuti oleh pembangunan dan modernisasi infrastruktur pascapanen (0,3368) serta reformasi regulasi keuangan Bulog (0,1997).

Implikasi kebijakan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan HPP memerlukan intervensi struktural berbasis kelembagaan, khususnya penguatan lembaga ekonomi petani dan penciptaan mekanisme pasar yang lebih kompetitif di tingkat desa. Tanpa perbaikan institusional tersebut, kebijakan harga pemerintah cenderung tidak efektif dalam melindungi pendapatan petani.

Penelitian ini terbatas pada perspektif pemangku kepentingan kunci dan belum memasukkan analisis kuantitatif biaya-manfaat. Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan analisis ekonomi kebijakan untuk mengukur efisiensi dan keberlanjutan setiap alternatif strategi.

Daftar Pustaka

- Aflah, B. M., Suhartini, E., & Afiriyanti, J. (2023). Paradoks Hubungan Petani Padi dan Tengkulak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(4), 310-320.
- Evahelda, E., Astuti, P. R., Maryam, M., & Sari, P. (2013). Aktivitas Panen dan Pascapanen Padi di Desa Rias Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Enviagro, Jurnal Pertanian dan Lingkungan*, 11(1), 1-41.
- Febryanto, I. D., Berlianto, R., & Prihono, P. (2022). Pengaplikasian Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Pemilihan Lokasi Gudang Penyimpanan Barang Onlineshop (Studi Kasus: Ekspedisi Pengiriman Barang Jadi). *Prozima*, 6(2), 120-129.
- Ikorasaki, F., Tahel, F., Siregar, E. T., Purba, I. P., Ginting, E., & Sitinjak, N. M. (2024). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Menentukan Beras Layak Konsumsi pada Perum Bulog Kota Medan. *Jurnal Widya*. 5 (1), 494-507.
- Lestari, L. S., Fitriansyah, A., & Hutajulu, B. M. W. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Padi Berkualitas Pertanian Desa Cipajang Metode AHP. *Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan*, 4(4), 353-360.
- Maulana, M., & Rachman Benny. (2011). Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 331-347.

- Nopariansyah, L., Agustina, F., & Setiawan, I. (2021). Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Permintaan dan Penawaran Gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Journal of Integrated Agribusiness*, 3(2), 130-143. 10.33019/jia.v3i2.1174.
- Oktia, S., Setiawan, I., & Agustina, F. (2020). Analisis Pola Penjualan Hasil Komoditi Padi Sawah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(2), 76-90. 10.33019/jia.v2i2.1507.
- Ramadhanty, S. B., & Kusuma, S. H. (2021). Penentuan Faktor-Faktor Prioritas Pengembangan Kawasan Agropolitan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Padi di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), 2301-9271.
- Suparmin, S., Siddik, M., Zaini, A., & Tajidan, T., (2022). Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah Sebagai Instrumen Stabilitas Harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 147-159. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v20n2.2022>.
- Wulandari, R. E. (2019). Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perangkingan Bengkel Mobil Terbaik di Kota Kupang. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 5(1), 13-17.